PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (*E-PROCUREMENT*) TERHADAP *FRAUD* PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan)

Rahmawan Satriyo Nugroho, Alfi Haris Wanto, Trisnawati
Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
E-mail: rionugroho32@yahoo.com

Abstract: The Influenced Of Electronical Procurement System (E-Procurement) To The Government Procurement Of Goods/Services(Study on The Magetan District Working Units Area)*. E-procurement is an auction system in acquiring government goods and services by using technology, information and communication based on the internet in carry out stages or all of procurement processes with purpose the government procurement of goods and services can run effectively, efficient, open, and accountable. There are several factors that influenced to the implementation of e -procurement in order to meet with the main purpose of implementing. This study is using of explanatory research by using 45 employees that involved in the procurement process as samples. The result of the research shows that e-procurement implementation system has a positive direction and influence significantly to government procurement of goods/services fraud. An influence that was expected from e-procurement implementation in Magetan District working unitsarea is can be preventive efforts again government goods/services fraud.*

Keywords: *goods and service procurement, fraud, e-procurement implementation*

Abstrak: Pengaruh Implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektrinik (*E-Procurement)*Terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan). *E-procurement* adalah sebuah sistem lelang dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet dalam melaksanakan tahapan atau semua proses pengadaan dengan tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi *e-procurement* agar dapat sesuai dengan tujuan digunakannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menjelaskan sejauh mana pengaruh implementasi sistem *e-procurement* terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah. Penelitian ini memakai jenis *explanatory research* dengan menggunakan 45 pegawai yang terlibat dalam proses pengadaan sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *e-procurement* berpengaruhsecara signifikan dan memiliki arah yang positif terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengaruh yang diharapkan dari implementasi *e-procurement* pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Magetan adalah upaya pencegahan terhadap tindakan *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kata kunci: pengadaan barang/jasa, kecurangan, implementasi *e-procurement*

Pendahuluan

Perkembangan perekonomian dunia yang semakin kompleks juga diiringi dengan semakin berkembangnya *fraud* atau biasa dikenal dengan istilah kecurangan dalam bidang keuangan. Praktik-praktik *fraud* yang sering terjadi antara lain, penyalahgunaan kepentingan, penyuapan, penerimaan yang tidak sah, korupsi, dan lain sebagainya. Praktik kecurangan dalam bidang keuangan tidak hanya terjadi pada sektor swasta saja melainkan terjadi pula pada sektor publik atau pemerintahan, yang tentunya merugikan bagi masyarakat dan Negara

Selama ini negara harus menanggung kerugian akibat dari praktik *fraud* yang terjadi di lingkungan pemerintah dan berlangsung-terus menerus.Salah satu *fraud* yang sudah jamak terjadi dan familiar di lingkungan pemerintah adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi menjadi isu yang paling fenomenal dan menarik untuk dibahas, meskipun banyak kasus sudah terungkap dan pelakunya diproses hukum, belum ada indikasi bahwa tindakan *fraud* tersebut akan segera terhenti. Justru seiring berjalannya waktu tindakan *fraud* semakin kompleks dengan berbagai macam modus.

Sebagai salah satu kegiatan pelayanan publik, pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan aktivitas yang paling disorot berbagai media, banyak pejabat pemerintah harus berhadapan dengan hukum karena melakukan penyelewengan. Menurut data yang dinyatakan oleh *Indonesia Procurement Watch* (IPW) menyatakan bahwa, dari 385 kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 70 persen diantaranya merupakan kasus pengadaan barang dan jasa LKPP (2010, h. 19) menyebutkan 3 (tiga) kelemahan yang ada dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah selama ini, yaitu: terkait transparansi, inefisiensi, dan ketidaksesuaian fungsi pengadaan.

Pengadaan menjadi salah satu penyumbang terbesar tindak pidana korupsi dalam sektor keuangan publik. Kegagalan sistem tersebut mengindikasikan terdapat kesalahan dalam sistem akutansi dan adanya konflik kepentingan dalam badan organisasi. Sistem pengadaan barang/jasa pemerintah dianggap menjadi sumber utama kebocoran anggaran, dimana pengguaan sistem konvensional memungkinkan korupsi dan kolusi yang mengakibatkan kemerosotan besar dalam pelayanan jasa publik. Melihat hal tersebut, kiranya memang diperlukan suatu penelitian mendalam terkait faktor-faktor apa saja yang berpengaruh, sehingga *fraud* atau kecurangan pada kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah mampu ditekan.

Penelitian yang penulis lakukan menitik beratkan pada salah satu faktor utama dari *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu sistem dan prosedur pengadaan. Mengingat sistem pengadaan yang memberikan peluang besar bagi tindak korupsi maupun kolusi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perubahan sistem pengadaan konvensional menjadi sistem pengadaan elektronik berbasis teknologi informasi (internet) atau yang dikenal dengan sistem *e-procurement* berpengaruh untuk menekan peluang *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah.

E-procurement pada dasarnya mengubah pola pelaksanaan yang manual dan rawan pelanggaran menjadi sistem elektronik yang sistemik dengan mengurangi tatap muka, sehingga dengan otomatis peluang untuk adanya penyelewengan berkurang. Terdapat lima tema utama yang menjadi dasar implementasi *e-procurement* meliputi: perubahan dalam total biaya perolehan, perubahan terhadap karakteristik organisasi, perubahan struktur pemerintahan, sistem spesifikasi; dan pelaksanaan manajemen, dimana kelima tema tersebut saling berhubungan dan terintegrasi satu dengan yang lainnya.

Kabupaten Magetan merupakan salah satu Pemerintah Daerah yang menerapkan sistem *e-procurement* dalam proses pengadaan barang/jasa. Sebagai organisasi publik Pemerintah Kabupaten Magetan memiliki fungsi untuk memberikan layanan dan pemenuhan kebutuhan publik yang salah satunya melalui pengadaan barang/jasa secara elektronik. Implemetasi *e-procurement* di Kabupaten Magetan berawal dengan mulai dirintisnya LPSE pada tahun 2010 yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengaadaan Barang/Jasa dan mulai diresmikan pada 25 April 2011. Hal ini ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Bupati Magetan Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Layanan Secara Elektronik, dengan dikeluarkannya peraturan daerah tersebut, maka tiap satuan kerja yang berada dibawah Pemerintah Kabupaten Magetan harus melaksanakan proses kegiatan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini didukung dengan pernyataan bupati magetan yang antusias dengan diselenggarakannya *e-procurement* dapat menyelesaikan masalah efektifitas yang timbul dalam proses pengadaan barang/jasa selama ini.

Sesuai dengan tujuan dilaksanakannya*e-procurement* sebagai upaya meminimalisir *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah dan mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik, maka komitmen dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan menjadi prasyarat utama. Hal ini mendorong pejabat yang berwenang pada pengadaan barang/jasa untuk taat pada peraturan perundang-undangan. Berdasarakan hal tersebut, maka skripsi ini berjudul"Pengaruh Implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (*E-Procurement*) terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan).

Tinjauan Pustaka

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (2011, h. 11) menjelaskan bahwa pengadaan adalah kegiatan untuk mendapatkan barang/jasa secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunaanya. Pengertian pengadaan lainnya menurut Kiswara (2011, h. 6) mendefinisikan pengadaan barang/jasa pemerintah (*government procurement*) sebagai usaha untuk memperoleh barang, jasa dan prasarana umum dalam waktu

tertentu yang menghasilkan nilai terbaik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat.

2. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*)

E-procurement mengacu pada penggunaan berbasis Internet (terintegrasi) teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk melaksanakan tahapan atau semua proses pengadaan termasuk pencarian, *sourcing,* negosiasi, memesan penerimaan, dan *review* pasca-pembelian (Croom & Brandon-Jones, 2004).

Pelakasaan *e-procurement* harus dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan tujuan pengadaan, yaitu kualitas, ketepatan waktu, biaya, meminimalkan resiko bisnis, keuangan dan teknis; memaksimalkan kompetisi dan memaksimalkan integritas. *E-procurement* mengacu pada penggunaan terintegrasi (berbasis web) sistem komunikasi untuk melaksanakan sebagian atau seluruh proses pembelian, suatu proses yang dapat menggabungkan tahap dari awal identifikasi kebutuhan oleh pengguna, proses pelelangan, negosiasi, pemesanan, penerimaan dan pasca-pembelian/monitoring dan evaluasi. Terdapat lima tema utama yang menjadi dasar implementasi *e-procurement* yang digunakan sebagai indikator keberhasilan implementasi, dimana kelima tema tersebut saling berhubungan dan terintregasi. Kelima indikator yang diutarakan oleh Bawono(2011, h. 24-27) adalah sebagai berikut:

a. Perubahan total biaya perolehan, yaitu . pengurangan biaya yang timbul sebagai hasil dari '*digitalisasi*' katalog, dimana lebih sedikit kesalahan dalam proses pemesanan, pengurangan persediaan, dan meminimalkan biaya *marketing* dari *supplier*
b. Perubahan karakteristik organisasi, yaitu terlihat dari sifat perubahan perilaku dan hubungan untuk organisasi dan siklus logistik organisasi sebagai hasil adopsi sistem.
c. Perubahan struktur organisasi, yaitu dilihat dari pergeseran hubungan, peningkatan pertukaran informasi antara panitia pengadaan dengan calon penyedia, serta kemudahan pencarian dan transparansi.
d. Spesifikasi sistem, yaitu berkaitan dengan infrastruktur sistem termasuk integrasi dengan perangkat lunak lainnya, seperti sistem perencanaan dan pengendalian serta sistem keuangan.
e. Manajemen pelaksanaan, yaitu Implementasi sistem informasi dalam organisasi bertujuan untuk mendukung kegiatan, meningkatkan produktifitas, mengurangi biaya operasional, dan menunjang pengambilan keputusan dll.

3. Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Yulifah (2014, h. 22) memberikan definisi *fraud* sebagai suatu tindakan yang salah dan tidak bertanggung jawab dengan menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan pribadi namun memberikan dampak kerugian pada kepentingan orang lain. Pembahasan dalam penelitian ini agar lebih mudah memfouskan pengertian *fraud* pada *fraud* internal yang terjadi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan instansi pemerintah yang mengakibatkan terjadinya kerugian Negara

Kiswara (2011, h. 7) mengutarakan *fraud* yang terjadi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Barang/jasa tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi/masyarakat, naik secara jenis, kualitas maupun kuantitas.
b. Spesifikasi barang/jasa berbeda antara yang dijanjikan dalam kontrak dengan yang selesai dikerjakan.
c. *Volume* (kuantitas) barang/jasa yang telah diselesaikan oleh penyedia tidak sesuai dengan perjanjian/kontrak.
d. Mengandung unsur penggelembungan harga (*mark-up),* karenan perbedaan harga dengan pasaran.
e. Penyelesaian pekerjaan yang tidak tepat waktu, terlambat dari perjanjian dalam kontrak.

4. Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dan konsep mengenai tema utama implementasi sistem pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) yang diajukan oleh Bawono (2011), maka dapat disajikan kerangka pemikiran untuk menggambarkan tentang implementasi sistem *e-procuremetn*, dan dijabarkan menjadi beberapa indikator. Kerangka pikir penelitian menggambarkan bagaimana pengaruh antara implementasi sistem *e-procurement* terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah. Dari hasil analisis data statistika tersebut akan menggambarkan secara statistik bagaimana implementasi sistem pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) dan juga digunakan untuk menetapkan kesimpulan dan rekomendasi bagi satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Magetan. Berikut peneliti sajikan kerangka pemikiran pada penelitian ini pada gambar 1.

5. Hipotesis Penelitian

Pengujian hipotesis ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara perubahan total biaya perolehan, perubahan struktur organisasi, perubahan karakteristik organisasi, spesifikasi

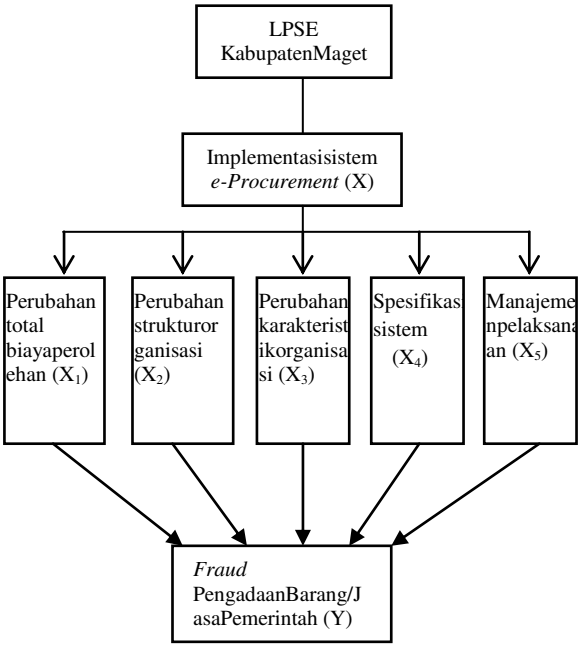

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

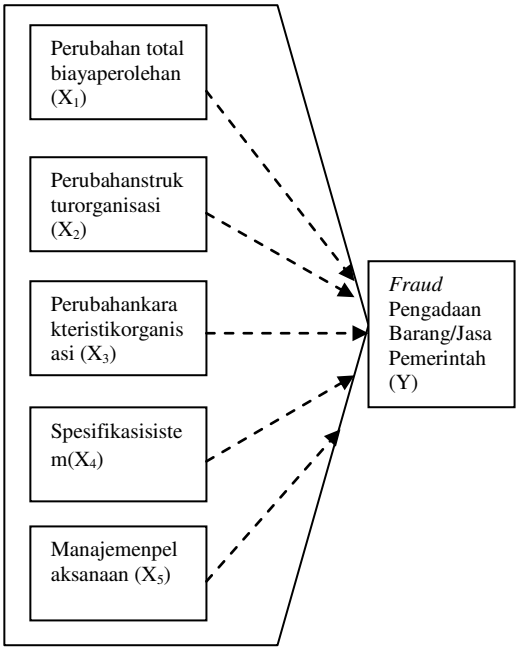

Gambar 2. Hipotesis Penelitian
Keterangan : - - - - - Pengaruh secara Parsial

Pengaruh secara Simultan

sistem dan manajemen pelaksanaan, terhadap implementasisistem *e-Procurement*. Hipotesis nol (Ho) yaitu suatu hipotesis tentang tidak adanya pengaruh yang signifikan yang pada umumnya diformulasikan untuk ditolak dan hipotesis alternatifnya (Ha) adalah hipotesis penelitian. Perumusan Ho dan Ha adalah sebagai mana pada gambar 2.

a. Diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dimensi implementasi sistem pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) yang terdiri dari variabel total biaya perolehan (X_1), perubahan struktur organisasi (X_2), perubahan karakteristik organisasi (X_3) spesifikasi sistem (X_4), manajemen pelaksanaan (X_5) terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah (Y) di lingkup SKPD Kabupaten Magetan).
b. Diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial variabel perubahan total biaya perolehan (X_1) terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah (Y) di lingkup SKPD Kabupaten Magetan.
c. Diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial variabel perubahan karakteristik organisasi (X_2) terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah (Y) di lingkup SKPD Kabupaten Magetan.
d. Diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial variabel perubahan struktur organisasi (X_3) terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah (Y) di lingkup SKPD Kabupaten Magetan.
e. Diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial variabel spesifikasi sistem (X_4) terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah (Y) di lingkup SKPD Kabupaten Magetan.
f. Diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial variabel manajemen pelaksanaan (X_5) terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah (Y) di lingkup SKPD Kabupaten Magetan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *explanatory research*dengan pendekatan kuantitatif dengan metode *survey* mengunakan alat bantu kuesioner. Populasi dan sampel penelitian ini adalah pengguna/operator sistem *e-procurement* di lingkup SKPD Kabupaten Magetan. Jumlah pegawai yang memiliki wewenang dan bertanggung jawab sebagai operator pelaksana sistem sebanyak 45 orang. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala *Likert*, skala *Likert* digunakan untuk mengukur hasil jawaban atau pendapat responden dengan lima pilihan jawaban yang memiliki tingkatan skor berbeda. Data yang akan diolah diperoleh melalui penyebaran angket kepada pegawai yang terlibat dalam kegiatan pengadaan dalam lingkup SKPD Kabupaten Magetan, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan alat bantu program aplikasi komputer SPSS Versi 20.

Tabel 1
Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Item
Perubahan total biaya perolehan (X_1)	Proses Pemesanan	meminimalisir kesalahan pemesanan.
	Biaya *Marketting*	memudahkan dalam mengelola persediaan stok.
	Pembayaran	mampu meminimalkan biaya marketing dari supplier
Perubahan karakteristik organisasi (X_2)	Koordinasi	mempermudah koordinasi.
	Manajemen Logistik	meningkatkan kolaborasi antara panitai pengadaan dengan calon penyedia.
	Inventarisasi	membantu mempermudah inventarisasi logistik
Perubahan struktur organisasi (X_3)	Pola Hubungan	mempermudah penyedia barang dan jasa untuk mengikuti lelang (transparansi).
	Alur Informasi	meningkatkan persaingan sempurna dalam pasar
	Transparansi	membantu mempermudah pencarian barang/jasa yang sesuai kebutuhan.
	Persaingan Sehat	
Spesifikasi sistem (X_4)	Integrasi	mampu terintegrasi dengan aplikasi sistem lainya.
	Perencanaan & Pengendalian	memiliki server yang handal
	Infrastruktur Sistem	membantu dalam melakukan kegiatan perencanaan dan pengawasan
	Server	mudah dalam mengelola laporan keuangan.
Manajemen pelaksanaan (X_5)	Produktifitas	meningkatkan akuntabilitas publik.
	Pengambilan Keputusan	membantu mencegah dari tindakan korup.
	Efektif	mempercepat pelaksanaan kegiatan pengadaan.
	Efisien	berkontribusi dalam menekan biaya transaksi (inefisiensi)
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Y)	Inefisiensi	meminimalisir ketidaksesuaian anatar barang/jasa yang diperjanjikan dalam kontrak dengan kebutuhan instansi/masyarakat
	Markup	ketidaksesuaian spesifikasi teknis yang dikerjakan penyedia.
	Korupsi	menghindari ketidaksesuaian antara volume (kuantitas) barang/jasa yang telah diselesaikan dengan perjanjian di kontrak.
	Tidak sesuai	mencegah ketidakwajaran harga yang disepakati dalam kontrak/penggelembung harga (mark-up).
	Pengerjaan molor	membantu penyelesain kegiatan pengadan menjadi lebih cepat.

Langkah analisis data yang digunakan, antara lain:

1. Uji instrumen penelitian, yang terdiri dari:
   a. Uji validitas
   b. Uji reliabilitas
2. Uji asumsi klasik, yang terdiri dari:
   a. Uji normalitas
   b. Uji linearitas
   c. Uji multikolinearitas
   d. Uji heterokedatisitas
3. Analisis data, yang terdiri dari:
   a. Analisis regresi berganda

b. Koefisien korelasi
c. Koefisien determinasi

4. Uji hipotesis, yang terdiri dari:
   a. Uji F
   b. Uji t

Pembahasan

1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

Var	Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Sig	Ket
	$X_{1.1}$	0,349	0,25	0,000	Valid
	$X_{1.2}$	0,611	0,25	0,000	Valid
	$X_{1.3}$	0,364	0,25	0,000	Valid
	$X_{2.1}$	0,340	0,25	0,000	Valid
	$X_{2.2}$	0,296	0,25	0,000	Valid
	$X_{2.3}$	0,631	0,25	0,000	Valid
	$X_{3.1}$	0,362	0,25	0,000	Valid
	$X_{3.2}$	0,262	0,25	0,000	Valid
	$X_{3.3}$	0,355	0,25	0,000	Valid
	$X_{4.1}$	0,785	0,25	0,000	Valid
	$X_{4.2}$	0,440	0,25	0,000	Valid
	$X_{4.3}$	0,319	0,25	0,000	Valid
	$X_{4.4}$	0,662	0,25	0,000	Valid
	$X_{5.1}$	0,407	0,25	0,000	Valid
	$X_{5.2}$	0,500	0,25	0,000	Valid
	$X_{5.3}$	0,468	0,25	0,000	Valid
	$X_{5.4}$	0,385	0,25	0,000	Valid
	Y_1	0,498	0,25	0,000	Valid
	Y_2	0,711	0,25	0,000	Valid
	Y_3	0,630	0,25	0,000	Valid
	Y_4	0,524	0,25	0,000	Valid
	Y_5	0,358	0,25	0,000	Valid

Berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil bahwa seluruh item penelitian memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05 (5%) dan $r_{hitung} > rt_{abel}$, maka dapat disimpulkan instrument penelitian tersebut valid. Pernyataan yang terdapat pada X1, X2, X3, X4, X5 dan Y dengan demikian dinyatakan valid. Berdasarkan pada hasill pengujian diperoleh nilai koefisien reliabilitas untuk seluruh variabel X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 dan Y lebih besar dari 0,6. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh item pernyataa dalam angket adalah reliabel

2. Pengaruh Implementasi *E-Procurement* Terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Simultan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan total biaya perolehan (X_1), perubahan karakteristik organisasi (X_2), perubahan struktur organisasi (X_3), spesifikasi sistem (X_4), manajemen pelaksanaan (X_5) secara simultan atau bersama-sama dapat mempengaruhi secara signifikan pada *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah (Y). Nilai F_{hitung}didapatkan sebesar 3,651 dimana lebih besar dari nilai F_{tabel}penelitian sebesar 2,61. Maka diperoleh persamaan $F_{hitung} > F_{tabel}$ (3,651 > 2,61), yang artinya bahwa secara simultan atau bersama-sama kelima variabel implementasi sistem *e-procurement* (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pengadaan barang/jasa pemerintah (Y).

Selanjutnya didapatkan bahwa nilai R_{square} sebesar 0,696artinya kemampuan persamaan regresi dalam memprediksi nilai variabel terikat adalah 69,6%. Nilai koefisien determinasi yang menunjukkan nilai 69,6% tergolong pada klasifikasi cukup kuat. Lebih lanjut nilai 69,6% mengindikasikan bahwa perubahan total biaya perolehan, perubahan karakteristik organisasi, perubahan struktur organisasi, spesifikasi sistem, manajemen pelaksanaan dapat menjelaskan pecegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar 69.6%, untuk sisanya 33,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model regresi.

3. Pengaruh Implementasi *E-Procurement* Terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Parsial

Hasil analisis regresi berganda variabel-variabelimplementasi sistem *e-procurement* yang terdiri dari variabel total biaya perolehan (X_1), perubahan struktur organisasi (X_2), perubahan karakteristik organisasi (X_3) spesifikasi sistem (X_4), manajemen pelaksanaan (X_5) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel terhadap variabel *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah (Y). Masing-masing variabel X diperoleh nilai koefisien regresi (b) secara berurut sebesar 0,290, 0,391, 0,327, 0,428, dan 0,411 dengan tanda positif menunjukkan bahwa variabel-variabel implementasi *e-procurement* terhadap variabel kualitas pelayanan mempunyai pengaruh yang searah dan positif. Jika dilakukan evaluasi dan perbaikan sehingga nilai dari masing-masing variabel implementasi *e-procurement* mengalami peningkatan maka efektifitas pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa juga akan mengalami peningkatan.

4. Variabel X yang Paling Dominan

Hasil analisis regresi linier berganda seluruh variabel X dilakukan perbandigan, dengan menggunakan metode perbandingan tersebut diketahui variabel spesifikasi sistem (X_4) memiliki koefisien regresi terbesar jika dibandigkan dengan variabel bebas lainnya yaitu 0,428. Hal tersebut berarti spesifikasi sistem

menjadi faktor yang paling efektif dalam implemetasi sistem *e-procurement* terhadap *fraud* pengadaan barang/jassa pemerintah, dimana dalam penelitian ini konsep yang digunakan adalah upaya untuk mencegah tingkat *fraud* pengadaan barang/jasa pememrintah.

Kesimpulan

1. Variabel-variabel implementasi sistem *e-procurement* yang terdiri dari perubahan total biaya perolehan, perubahan struktur organisasi, perubahan karakteristik organisasi, spesifikasi sistem, manajemen pelaksanaan secara simultan atau bersama-sama dan parsial atau individu berpengaruh terhadap pengadaan barang/jasa pemeritah.
2. Berdasarkan variabel-variabel implementasi sistem *e-procurement* yang terdiri dari perubahan total biaya perolehan, perubahan struktur organisasi, perubahan karakteristik organisasi, spesifikasi sistem, manajemen pelaksanaan, diketahui bahwa variabel spesifikasi sistem (X_4) berpengaruh paling dominan terhadap pengadaan barang/jasa pemeritah.
3. Berdasarkan perhitungan analisis data diperoleh nilai koefisien determinasi *R square* yaitu 0,696 yang menunjukkan bahwa perubahan total biaya perolehan, perubahan struktur organisasi, perubahan karakteristik organisasi, spesifikasi sistem, manajemen pelaksanaan mampu menjelaskan pengadaan barang/jasa pemeritah sebesar 69,6%, sedangkan sisanya 30,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model regresi.

Saran

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *e-procurement* memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah, oleh karena itu hendaknya pemerintah khususnya LKPP meningkatkan akselerasi implementasi sistem pengadaan secara elektronik (*e-procurement)*.
2. Hasil penelitian didapatkan bahwa variabel spesifikasi sistem adalah variabel yang berpengaruh dominan terhadap pengadaan barang/jasa. Oleh karena itu LKPP selaku lembaga yang bertanggung jawab dan memiliki hak untuk mengembangkan sistem *e-procurement,* harus berfokus terhadap variabel tersebut.
3. Disamping memperbaiki dan meningkatkan variabel spesifikasi sistem yang merupakan variabel dominan. LKPP hendak tetap memperhatikan variabel-variabel lain yang juga memiliki pengaruh terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah seperti perubahan total biaya perolehan, perubahan struktur organisasi, perubahan karakteristik organisasi, dan manajemen pelaksanaan.
4. Pengadaan barang/jasa pemerintah harus diawasi dengan baik agar dapat menekan tingkat *fraud* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang merugikan Negara dan menghambat kesejahteraan masyarakat. Untuk menekan tingkat kecurangan tersebut maka komitmen aparatur pengadaan dan peran auditor internal sangat penting sebagai fungsi pengawasan.

Daftar Pustaka

Adimaja. (2010) ***Pengaruh Penerapan E-Procurement Terhadap Peningkatan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Publik Pada Dinas Pendidikan Pronvinsi Kepulauan Riau***. Jakarta, Universitas Terbuka. Tesis yang dipublikasikan

Aslina, Endang. (2012**)** ***The Procurement of Government Goods and Services in Indonesia***. Jurnal Ilmiah ESAI Volume 6, Nomor1, Januari 2012.

Damayanti, A.F & Domai, T & Wachid, A. (2013)***Penerapan E-Procurement dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Malang.*** Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.1 No.2, Hal 15-22

Kiswara, Endang. (2011)***Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkungan Instansi Pemerintah di Wilayah Semarang***. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). (2009)***Implementasi e-Procurement Sebagai Inovasi dalam Pelayanan Publik***. Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengaadaan Barang/Jasa, Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia

Peraturan Bupati Magetan Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Layanan Secara Elektronik, Magetan, Pemerintah Kabupaten Magetan